

**PEMBREDELAN PERS PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU
DAN RELEVANSINYA BAGI MATA KULIAH SEJARAH INDONESIA**

MUTAKHIR

Oleh:

Imron¹

Sariyatun, Tri Yuniyanto²

ABSTRACT

The purpose of this study were to describe: (1) the New Order government policies against the press, (2) the press orientation and position during the New Order government, (3) the media bans which occurred during the New Order government, (4) the impact of media bans which occurred during the New Order government, (5) the relevance of the research for current Indonesia history study. This research used historical method with the sources were interviews, primary and secondary written sources. Data collection techniques used interviews with the actors of history and literature studies in various libraries. The data analysis technique used was the historical analysis techniques with content analysis. The steps taken in the historical method were: (1) heuristic, (2) criticism, (3) interpretation, (4) historiography.

The study results concluded: (1) the New Order government policy of press were preventive and repressive; (2) the press orientation and position during the New Order government era sourced by company administrative management and government role domination; (3) press banning during the New Order era started from authoritarian attitude and government policy deviation of press; (4) the impact of press banning in the New Order era were press depoliticization, commercialization, and deterioration of press and public relations with the government; (5) banning of the press during the New Order government relevated with information and political communication study in Current Indonesia History course material.

Keywords: *Press, the New Order, Banning, current Indonesia History*

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS.

² Dosen Pembimbing pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS.

Kebijakan Orde Baru yang mengatur tentang pers merupakan kebijakan politik pembangunan. Politik pembangunan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru adalah politik pembangunan yang kapitalistik dengan strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan (Abar, 1995: 190). Alfian (1990: 241) menjelaskan politik pembangunan nasional yang dimaksudkan adalah proses modernisasi atau proses pembinaan bangsa di segala bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan maupun mental.

Tujuan utama dari strategi pembangunan bidang ekonomi adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan standar *Gross National Product* (Dhakidae, 2003). Akibatnya Indonesia ketergantungan oleh negara-negara kapitalis maju dari mulai modal asing, teknologi, keterampilan sampai pasar produk industri. Masuknya modal asing menyebabkan praktek kolusi yang terjadi ditataran elite pemerintahan antara para jenderal dan cukong. Bermula dari segi ekonomi akhirnya berimplikasi pada politik pembangunan Orde Baru yang menjadi sorotan pers Indonesia sekitar tahun 1972.

Selama tahun 1973 kritik pers semakin kerasterhadap politik pembangunan dengan strategi pertumbuhan terutama berbagai implikasi sosial ekonomi (Abar, 1995: 193). Mahasiswa juga ikut memprotes politik pembangunan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru agar ditinjau kembali pelaksanaannya. Aksi protes mahasiswa dilakukan di sejumlah kota besar Indonesia seperti Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta ditujukan kepada Asisten Pribadi Presiden yang dinilai menjadi penyebab ketergantungan ekonomi Indonesia kepada hutang.

Klimaks dari kritik pers dan aksi protes mahasiswa terjadi pada bulan Januari 1974 ketika itu harga-harga sedang melonjak naik. Pada masa itu pers diwarnai dengan tradisi pers perjuangan dan mengambil gaya bak kampanye, pers di masa itu berdiri bersama masyarakat mengkritisi beragam kebijakan pemerintahan (Hill, 2011: 37). Pemerintah

bereaksi dengan mengeluarkan tangan besi, mencekik baik para demonstran maupun surat kabar yang bersimpati pada mereka.

Puncak dari tekanan Orde Baru yaitu pembredelan 12 surat kabar dimulai dengan pencabutan Surat Izin Terbit oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia dan Surat Izin Cetak (SIC) oleh Pangkoptik Jaya (Abidin, 2005: 81). Alasannya karena dianggap telah menghasut rakyat dan dapat merusak wibawa serta kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional. Persitiwa pembredelan pers tersebut menandai sikap otoriter penguasa melalui kebijakan perundang-undangan yang represif.

Orde Baru dicirikan sebagai negara yang kuat, dominan, menyeluruh dan tertutup sehingga dominasi negara dapat terlihat jelas dalam proses pengambilan keputusan (Rachman, 2007: 47). Orde Baru adalah suatu tatanan kehidupan baru di segala bidang yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Dhakidae, 2003). Terbentuknya negara Orde Baru dengan Presiden Soeharto sebagai pemegang kekuasaan tunggal berada dalam konteks perkembangan kapitalisme global yang dikategorikan sebagai teoritis fasisme pembangunan atau kediktatoran fasis Orde Baru yang lebih represif dan totaliter.

Hidayat (2000) dalam analisis Robison menilai bahwa rezim Orde Baru sumber kekuasaan politik dan otoritas birokrasi berada di tangan aparat penguasa sendiri atau yang disebut *authoritarian corporatism*. Sifat negara Orde Baru yaitu pertama negara yang kuat dan dominan. Kedua, negara Orde Baru adalah negara yang dipimpin serta didukung oleh kekuatan militer yang bekerja sama dengan teknokrat dan birokrat sipil. Ketiga, negara Orde Baru melengkapi dirinya dengan aparat keamanan represif serta aparat politis ideologia untuk melestarikan dan mereproduksi kekuasaannya. Keempat, negara Orde Baru sejak awal kebangkitannya mendapatkan dukungan dari kapitalisme internasional. Dan kelima, negara Orde Baru mengalami instabilitas oleh faktor dari dalam negara dan faktor internasional (Abar, 1995: 211-218).

Kebijakan Orde Baru terhadap pers dimulai setelah dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers. Pada tahun 1966 disahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 yang mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Undang-undang yang lahir setelah TAP MPRS ini lebih mengatur dan menjamin kemerdekaan pers karena semua ketentuan mengenai keharusan mempunyai Surat Izin Terbit (SIT) serta tidak ada sensor pers dan pembredelan pers sudah dicabut.

Pada tahun 1978, pemerintahan Orde Baru mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor IV. TAP MPR RI nomor IV merupakan produk hukum transisi dari sistem politik Orde Baru yang semula demokratis mengarah ke otoriter dan represif. Gejala tersebut disebutkan dalam bagian f, TAP MPRS IV/1978 yang berbunyi, “untuk menjamin pertumbuhan pers yang sehat, pers yang bertanggungjawab maka undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers perlu ditinjau kembali”.

Tahun 1982 lahir Undang-Undang Nomor 21 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1967. Undang-Undang ini merupakan elaborasi dari TAP MPR nomor IV/1978 yang meminta peninjauan kembali ketentuan tentang pers, dalam hal ini UU Nomor 11 tahun 1966. TAP MPR Nomor II/1978 memerintahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 ditinjau, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 dan Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 tahun 1984 yang represif. Ketentuan represif diatur dengan pasal yang mengharuskan setiap penerbitan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Selama Orde Baru memerintah, tidak hanya pada tahun 1970an pers mengalami pembredelan, tahun 1980an juga terjadi pencabutan izin

pers yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai sistem Pers Pancasila. Pada kurun waktu 1990an kembali terjadi pembredelan (pencabutan izin SIUPP) yang dilakukan Menteri Penerangan.

SIUPP merupakan Peraturan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 01/PER/MENPEN/1984 setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (Abidin, 2005). Tidak ada hal yang membedakan dalam pelaksanaan pencabutan SIUPP berdasarkan pasal 33h Permenpen 01/1984 dengan pembredelan (Muis, 1996: 141-145). Kata pembredelan pers diganti dengan pencabutan SIUPP (Suroso, 2001: 8). Dengan dalih melanggar prinsip pers yang bebas dan bertanggungjawab, pemerintah melalui Menteri Penerangan kemudian mencabut Surat Izin Terbit dan SIUPP media massa.

Istilah penutupan atau penghentian penerbitan pers disebut pembredelan yang dialami oleh media massa cetak. Pembredelan pers berkaitan dengan produk hukum pemerintah seperti Undang-Undang. Apabila pers melanggar ketentuan perundangan-undangan, pemerintah secara konstitusi berhak menutup, melarang, mencabut dan memberangus izin atau peredaran terbitan media massa. Peristiwa pembredelan pers pada masa pemerintahan Orde Baru memberi pelajaran penting untuk menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Heri Susanto (2014: 60) menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran sejarah yang bersifat kronologis. Materi sejarah harus memiliki periodisasi dan kronologi yang diciptakan mengikuti peristiwa. Pembelajaran sejarah Indonesia tidak terlepas dari perubahan periode pada situasi dan kondisi tertentu. Seperti Sejarah Indonesia Mutakhir yang menjelaskan peristiwa masa pemerintahan Orde baru hingga Reormasi.

Dari paparan pendahuluan maka fokus permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap pers? Bagaimana orientasi dan posisi pers pada masa pemerintahan Orde

Baru? Bagaimana pembredelan pers pada masa pemerintahan Orde Baru? dan bagaimana dampak pembredelan pers pada masa pemerintahan Orde Baru? serta bagaimana relevansi hasil kajian penelitian dengan pembelajaran mata kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir?.

Tujuan penelitian yaitu mengetahui kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap pers. Mengetahui orientasi dan posisi pers pada masa pemerintahan Orde Baru. Mengetahui pembredelan pers pada masa pemerintahan Orde Baru. Mengetahui dampak pembredelan pers pada masa pemerintahan Orde Baru. Serta mengetahui relevansi kajian pembredelan pers pada masa pemerintahan Orde Baru bagi pembelajaran mata kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disajikan secara historis karena mengkaji masalah tentang Pembredelan Pers pada masa Pemerintahan Orde Baru dan Relevansinya bagi Pembelajaran Mata Kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir. Hal ini didasari atas tahun terjadinya peristiwa tersebut, maka peristiwa yang diteliti merupakan peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau. Oleh karena itu data-data yang digunakan untuk merekonstruksi peristiwa tersebut menggunakan data masa lampau, sehingga metode yang digunakan ialah metode historis atau metode penelitian sejarah. Menurut Nawawi (1998) metode penelitian sejarah adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu dan terlepas dari keadaan masa sekarang. Notosusanto (1978) menyebutkan bahwa metode sejarah merupakan sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis kemudian menyajikannya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Abdurrahman (1999) sumber primer

dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan langsung oleh saksi mata. Sedangkan sumber sekunder tidak disampaikan langsung oleh saksi mata dan bentuknya dapat berupa buku-buku, artikel, koran, majalah. Untuk memperoleh data informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian, sumber data yang digunakan adalah sumber primer maupun sekunder informan dan studi pustaka. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan analisis studi pustaka. Menurut Syamsuddin (1996) teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah. Empat tahap yang harus dipenuhi dalam melakukan penelitian yaitu: 1) heuristik; 2) kritik; 3) interpretasi; dan 4) historiografi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Orde Baru terhadap Pers

Pemerintahan Orde Baru mengawasi serta mengontrol pers melalui kebijakan pemerintah berupa Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang preventif hingga represif. Dimulai dengan Ketetapan MPRS RI Nomor XXXII/MPRS/1966 pada awal Orde Baru. Tap MPRS RI Nomor XXXIII/MPRS/1966 mengatur tentang Pembinaan Pers Indonesia. Selanjutnya dibuatlah Undang-Undang yang mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 yang merupakan hasil dari Ketetapan MPRS RI Nomor XXXII/MPRS/1966.

Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers memberi jaminan hukum pers nasional untuk menjalankan fungsi dan kewajibannya. Undang-Undang ini seolah menjadi tanggapan dari periode sebelumnya dimana pers seakan dibelenggu oleh peraturan pemerintah. Kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap pers berlanjut dengan lahirnya Ketetapan MPR RI Nomor IV tahun 1978 yang menyangkut keberlangsungan pers. Hal ini dikarenakan arah dan kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru diatur tentang penerangan dan pers.

Ketetapan ini dibuat untuk meninjau Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers agar terjaminnya pertumbuhan pers yang sehat maka diperkenalkanlah sifat pers bebas dan bertanggungjawab yang bersumber dari sistem pers Pancasila. Lahirnya ketetapan ini juga disinyalir akibat banyaknya aksi mahasiswa menentang kebijakan pemerintah dan menjadi permulaan sikap represif Orde Baru.

Peraturan terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah di masa Orde baru adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 dan Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 tahun 1984. Undang-Undang dan Permenpen menjadi alat represif pemerintah mengawasi dan mengelola informasi dan komunikasi pers di Indonesia. Hal itu tercermin melalui Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 yang berbunyi setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat SIUPP yang dikeluarkan pemerintah. Ketentuan Undang-Undang ini ternyata bertolak belakang dengan Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak menerbitkan pers, untuk itu tidak diperlukan Surat Izin Terbit (SIT). Pada dasarnya SIT atau SIUPP merupakan produk hukum represif yang mempunyai makna mengurangi atau menghapus kemerdekaan pers di Indonesia.

2. Orientasi dan Posisi Pers pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Orientasi dan posisi pers mengalami perkembangan selama masa pemerintahan Orde Baru dengan lahirnya pers yang mampu membawa aspirasi rakyat maupun pers yang menjadi pembawa informasi pemerintah. Menurut Abidin (2005) orientasi berhubungan erat dengan pemihakan atau sikap dari pers. Oleh karena itu pemihakan pers sangat penting untuk media massa supaya memperoleh kepercayaan pembaca dari para khalayak umum. Pembagian klasifikasi pada orientasi pers, pers

dibedakan menjadi dua golongan yaitu pers yang memihak pada masyarakat dan pers yang memihak pada pemerintah atau negara.

Pers yang memihak pada masyarakat adalah pers yang lebih banyak membela masyarakat dengan menyuarakan aspirasi, kehendak dan kepentingan masyarakat. Sedangkan orientasi yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru juga diwarnai dengan pers yang memihak pada pemerintahan. Hal itu disebabkan dengan lahirnya kepentingan-kepentingan politik media terhadap pemerintah dan masyarakat.

Pers yang memihak pada masyarakat menjadi wadah aspirasi untuk mengontrol kebijakan pemerintah, sedangkan pers yang memihak pada pemerintah seolah menjadi publikasi setiap kebijakan dengan pemberitaan yang pro pemerintah Orde Baru. Penyebab lain yang mengakibatkan penggolongan pers adalah persoalan-persoalan yang muncul selama masa Orde Baru. Selain itu juga faktor kepentingan politik dan bisnis yang mulai menghinggapai idealisme pers Indonesia sebagai komunikator antara pemerintah dan masyarakat.

Orientasi pers mampu terlihat melalui tajuk rencana, editorial dan pemberitaan suatu media menjadi pengontrol kebijakan pemerintah atau pembawa informasi pemerintah. Selama masa Orde Baru, manajemen administrasi merupakan faktor yang menentukan orientasi dan posisi pers pada masa Orde Baru. Kepandaian menempatkan posisi sesuai dengan kondisi politik yang terjadi melahirkan pers yang dapat bertahan di tengah tantangan sejumlah kebijakan pemerintah Orde Baru.

Dominasi peran pemerintah menentukan posisi pers pada masa pemerintahan Orde Baru. Posisi pers berhubungan dengan kuat atau lemahnya kedudukan pers terhadap negara (Abar, 1995: 13-14).Kekuasaan negara mengatur kebijakan dan kehidupan tentang pers dibutuhkan keluwesan dalam menempatkan posisi pers.Posisi pers dikatakan kuat ketika pers mampu mempengaruhi terbentuk atau tidak terbentuknya suatu keputusan politik. Sedangkan posisi pers dikatakan lemah apabila tidak mampu mempengaruhi terbentuk atau tidak

terbentuknya suatu keputusan politik. Jadi pers mempunyai posisi kuat apabila memiliki gagasan dari keputusan politik dan dikatakan lemah ketika menjadi konsumen kebijaksanaan pemerintah. Kuat atau lemah posisi pers disebabkan oleh kondisi politik, sosial dan ekonomi suatu negara.

3. Pembredelan Pers pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Pembredelan pada periode 1960an di masa Orde Baru dilakukan oleh Militer khususnya Kopkamtib dan Departemen Penerangan. Tujuannya dengan cara menerapkan Pers Pancasila dengan cara membenahi dan menghapus unsur PKI dan pro Soekarno dalam tubuh pers. Menurut J. Panglaykim and K. D. Thomas (1967) pada awal pemerintahannya, pemerintah Orde Baru mengumumkan program untuk mewujudkan tujuan stabilisasi dan rehabilitasi. Stabilisasi dan rehabilitasi pers dilakukan dengan cara membredel surat kabar atau majalah yang beraliran Komunis seperti *Harian Rakjat*, *Bintang Timur* dan lain sebagainya.

Periode 1970an, pembredelan disebabkan karena pemberitaan pers yang kritis atas aksi demonstrasi selama beberapa hari akibat ketidakpuasan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah dibidang politik, sosial dan ekonomi. Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa terjadi hampir disemua kota-kota besar khususnya Jakarta. Tujuan dari pembredelan pers untuk menjaga stabilitas politik dan kepentingan umum karena pemberitaannya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional. Penerbitan pers yang mengalami imbas pembredelan adalah *Indonesia Raya*, *Kompas* serta *Sinar Harapan*. Pers Mahasiswa juga ikut menjadi target bredel seperti *Harian KAMI* akibat sikap otoriter penguasa terhadap pers (Hill, 2011: 37-40).

Pada Periode 1980an, pembredelan diakibatkan karena kesewenangan Departemen Penerangan dalam mengatur pers. Melalui SIUPP Menteri Penerangan berhak mencabut surat izin usaha penerbitan

pers. Pers yang dianggap mengganggu kestabilan politik, ekonomi dan sosial negara dapat langsung dibredel. Tidak lain tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas nasional, keamanan, ketertiban dan kepentingan umum. Imbasnya yaitu pembredelan *Tempo* akibat pemberitaan kampanye partai Golkar yang rusuh. Pembredelan hingga mengakibatkan penutupan perusahaan pers untuk selama-lamanya terjadi pada periode 1980an. Surat kabar *Sinar Harapan* dan *Prioritas* dibredel akibat pencabutan SIUPP. Penyimpangan kebijakan melalui perundang-undangan oleh pemerintah mengakibatkan sejumlah pers dibredel. Penerapan pembredelan bertentangan dengan Undang-Undang Ketentuan Pokok Pers yang melarang sensor dan pembredelan.

Pada periode 1990an, pembredelan terjadi pada majalah *Monitor*, majalah *Tempo*, tabloid *Detik* dan majalah *Editor*. Pembredelan tersebut diakibatkan karena pemberitaan pers telah mengganggu ketertiban nasional, selain itu juga karena kesalahan manajemen administratif yang terjadi pada penerbitan pers. Tujuan yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan pembredelan pada tahun 1990an yaitu untuk menjaga stabilitas nasional. Supaya media massa tidak memperuncing keadaan dan akan membantu meredakan ketegangan dalam masyarakat melalui pemberitaan. Pembredelan yang disebabkan pemberitaan MISS SARA dan persoalan pemerintah merupakan kasus yang sering mendapat tanggapan dari masyarakat. Kasus *Monitor* merupakan pembredelan yang dianggap telah meresahkan masyarakat karena pemberitaan yang menyinggung tentang agama. Sedangkan kasus pembredelan surat kabar lain pada periode 1990an mendapat tanggapan dan antusiasme besar dari masyarakat karena dianggap sebagai bentuk sikap otoriter penguasa. Akibat pemberitaan mengenai persoalan yang dihadapi pemerintah, pers secara kritis menyajikannya dalam sebuah pemberitaan.

4. Dampak Pembredelan Pers pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Pembredelan pers pada masa Orde Baru merupakan sebuah peristiwa sejarah yang memiliki dampak politik, sosial, ekonomi bagi perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Terdapat perubahan politik, sosial dan ekonomi pasca pembredelan pers yang terjadi pada masa Orde Baru seperti perubahan Undang-Undang yang mengatur tentang pers atau tentang Delik Pers akibat pemberitaan tentang pemerintahan Orde Baru. Dampak politik lainnya adalah keberhasilan menghancurkan kekuatan komunisme dari Partai Komunis Indonesia (PKI), akhirnya membawa pada model pemerintahan baru yang bertekad melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dampak politik lainnya pasca pembredelan yaitu menurunnya kewibawaan yang dimiliki oleh seorang presiden ketika terjadi aksi penolakan kedatangan Perdana Menteri Jepang pada tahun 1974.

Pembredelan pers juga menyimpan kesan dalam percaturan politik Indonesia, karena ada keharaman meliput pertentangan dalam negosiasi tingkat tinggi. Pertikaian antarfraksi militer serta fakta seputar kematian sejumlah tentara akibat kecelakaan atau sebab tak jelas (Hill, 2011). Dampak politik lainnya yang terjadi pada masa Orde Baru yaitu Gugatan media massa terhadap Menpen menjadi preseden baru dalam dunia pers. Sebelumnya media massa yang dibredel pasrah namun *Tempo* pergi ke PTUN untuk mempersoalkan keputusan Harmoko sebagai Menteri Penerangan.

Dampak sosial pembredelan pers mengakibatkan gerakan demonstrasi akibat kekecewaan masyarakat kepada pemerintah Orde Baru. Selain itu masyarakat semakin mengerti akan posisi dan fungsi pers dengan ikut melakukan aksi demonstrasi secara spontan bersama-sama dari berbagai lapisan masyarakat. Pembredelan pers juga menjadi salah satu penyebab gerakan demontsrasi massa karena menuntut demokrasi melalui reformasi pemerintahan. Bidang ekonomi, wartawan dan karyawan penerbitan pers yang mengalami pembredelan harus mencari pekerjaan lainnya untuk menafkahi kehidupannya. Selain itu, pembredelan

pers mengakibatkan tingkat oplah iklan media massa ikut menurun sehingga mengharuskan beberapa media massa kecil bergabung dengan imperium bisnis media massa.

Dampak yang terjadi dari pembredelan pers yaitu terjadinya depolitisasi dan komersialisasi pers, dimana semakin mundurnya fungsi kontrol pers terhadap pemerintah menyebabkan ketergantungan pers pada pasar. Selain itu juga pasca pembredelan, hubungan pers dan pemerintah semakin menjauh. Akibatnya yaitu krisis informasi dan teror terhadap pers berupa peringatan, ancaman, penangkapan hingga pembunuhan.

5. Relevansi Pembredelan Pers pada masa Pemerintahan Orde Baru bagi Pembelajaran Mata Kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir

Pembredelan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru merupakan bagian sejarah Indonesia yang memiliki nilai historis yang tinggi karena dampak yang terjadi mempengaruhi kehidupan pers selanjutnya. Oleh sebab itu kajian mengenai pembredelan pers masuk dalam materi pembelajaran sejarah khususnya pada tingkat perguruan tinggi pada mata kuliah sejarah Indonesia Mutakhir. Sejarah Indonesia Mutakhir merupakan suatu periode sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lampau di Indonesia yang bersifat terkini, terbaru atau termodern. Sejarah Indonesia Mutakhir memiliki rentang waktu yang dimulai ketika masa pasca Demokrasi Terpimpin atau periode Orde Baru hingga masa Reformasi yang terjadi pada saat ini. Segala peristiwa yang terjadi pada masa lampau di Indonesia pasca Orde Lama yang memiliki nilai historis yang tinggi bagi manusia serta dalam perkembangan bangsa dan negara Indonesia menjadi kajian yang dipelajari dalam Sejarah Indonesia Mutakhir.

Terdapat kesesuaian antara kajian sejarah Indonesia Mutakhir yang melingkupi peristiwa Orde Baru dengan Materi pendidikan atau cakupan isi Mata Kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir yang ada di

perguruan tinggi khususnya di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS. Relevansi yang terjadi antara Pembredelan Pers pada masa pemerintahan Orde Baru pada mata kuliah sejarah Indonesia Mutakhir adalah kesesuaian waktu studi penelitian yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru dengan waktu kajian yang ada dalam mata kuliah sejarah Indonesia Mutakhir mulai dari awal Orde Baru hingga Reformasi. Relevansi lainnya adalah cakupan isi dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir tentang Informasi dan Komunikasi Politik di dalamnya terdapat kajian khusus mengenai Pembredelan Pers pada masa Pemerintahan Orde Baru. Materi mengenai Pembredelan Pers pada masa pemerintahan Orde Baru dapat membentuk karakter bagi peserta didik dengan mengambil nilai yang terjadi pada masa lampau. Pembredelan pers pada masa Orde Baru juga mempengaruhi segi politik, sosial dan ekonomi masyarakat sehingga dapat dijadikan pembelajaran bagi mahasiswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pembredelan Pers pada masa pemerintahan Orde Baru relevan dengan materi Informasi dan Komunikasi Politik dalam Mata Kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah Orde Baru berupa Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang bersifat preventif dan represif mempengaruhi kehidupan pers di Indonesia. Kebijakan preventif pemerintah Orde Baru dengan menetapkan Tap MPRS RI nomor XXXII/1966 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966. Sedangkan kebijakan represif pemerintah dimulai dengan Ketetapan MPR RI Nomor IV tahun 1978, Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 dan Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 tahun 1984.

Orientasi dan Posisi Pers sangat dipengaruhi oleh dominasi peran pemerintah dalam mengontrol kehidupan pers. Diperlukan kepandaian

dalam mengelola manajemen administrasi perusahaan pers agar dapat bertahan di tengah sejumlah kebijakan pemerintah terhadap pers. Orientasi dan posisi pers juga disebabkan oleh peta ideology dan bisnis media masa pada pemerintahan Orde Baru.

Pembredelan pers yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru disebabkan oleh sikap otoriter penguasa terhadap pers dengan membersihkan pers berifat komunis dan pers yang kritis mengontrol setiap kebijakan pemerintah. Pembredelan pers juga diakibatkan oleh pemberitaan demonstrasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan ketertiban umum. Kebijakan perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengatur pers digunakan sebagai alat politik dalam membredel pers yang melakukan pemberitaan unsur MISS SARRA dan persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah.

Dampak pembredelan pers yaitu terjadinya depolitisasi dan komersialisasi pers serta kemunduran hubungan antara pers dan pemerintah. Delik pers diterapkan untuk memberi sanksi terhadap pers yang melanggar ketentuan pers. Dampak lainnya yaitu terjadinya krisis informasi akibat sejumlah pers kritis dibredel selama masa Orde Baru. Selain itu pasca pembredelan muncul teror-teror terhadap pers berupa peringatan, ancaman, pemukulan, penyiksaan, sanksi, penangkapan dan pembunuhan kepada wartawan maupun karyawan pers. Oleh sebab itu muncul gerakan-gerakan protes akibat banyaknya pembredelan pers oleh kesewenangan pemerintah.

Relevansi pembredelan pers pada masa pemerintahan Orde Baru bagi pembelajaran Mata Kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir terdapat pada cakupan isi dari silabus mata kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir. Pembahasan materi pembredelan pers merupakan bagian dari materi Informasi dan Komunikasi Politik yang bersumber dari Silabus Mata Kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS. Oleh sebab itu kajian mengenai pembredelan pers masuk dalam materi pembelajaran sejarah Indonesia Mutakhir pada jenjang pendidikan

perguruan tinggi khususnya program studi pendidikan sejarah ataupun jurusan sejarah. Terdapat kesesuaian antara kajian sejarah Indonesia Mutakhir yang melingkupi peristiwa selama Orde Baru hingga Reformasi dengan kajian pembredelan pers yang merupakan peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muis. 1996. *Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers: Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika dan Hukum Pers*. Jakarta: PT Mario Grafika
- Akhmad Zaini Abar. 1995. *1966-1974 Kisah Pers Indonesia*. Yogyakarta: LkiS
- Alfian. 1990. *Pembangunan Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia
- D. N. Hidayat, E. Ghozali, H. Suwardi, S. K. Ishadi. 2000. *Pers Dalam Revolusi Mei Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Daniel Dhakidae. 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: PT. Gramedia
- Dudung Abdurahman. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Hadari Nawawi. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Heri Susanto. 2014. *Seputar Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Hill, David T. 2011. *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

M. Fadjiroel Rachman. 2007. *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat*. Depok: Penerbit Koekoesan

Nugroho Notosusanto. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah*. Jakarta: Yayasan Idayu

Suroso. 2001. *Menuju Pers Demokratis: Kritik Atas Profesionalisme Wartawan*. Yogyakarta: Lembaga Studi dan Inovasi Pendidikan

Syamsuddin dan Ismaun. 1996. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Depdikbud Ditjen Dikti-P2LPTK

Wikrama Iryans Abidin. 2005. *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo

JURNAL

Panglaykim, J dan Thomas, K.D. 1967. The New Order and the Economy. Journal Cornell University Indonesia, Volume 3 (April 1967), 73-120.. Diperoleh 1 November 2014 dari <http://cip.cornell.edu/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=seap.indo/1107136730>